

BAB VII

MODEL IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SUMATERA UTARA

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah ada secara teori adalah sebagai berikut.

Menurut Hamdi (2014:98), literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Kelompok bottom-up berfokus pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambiguitas dan konflik dari implementasi kebijakan. Dalam perspektif kelompok yang ketiga adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut: 1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif). 2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah

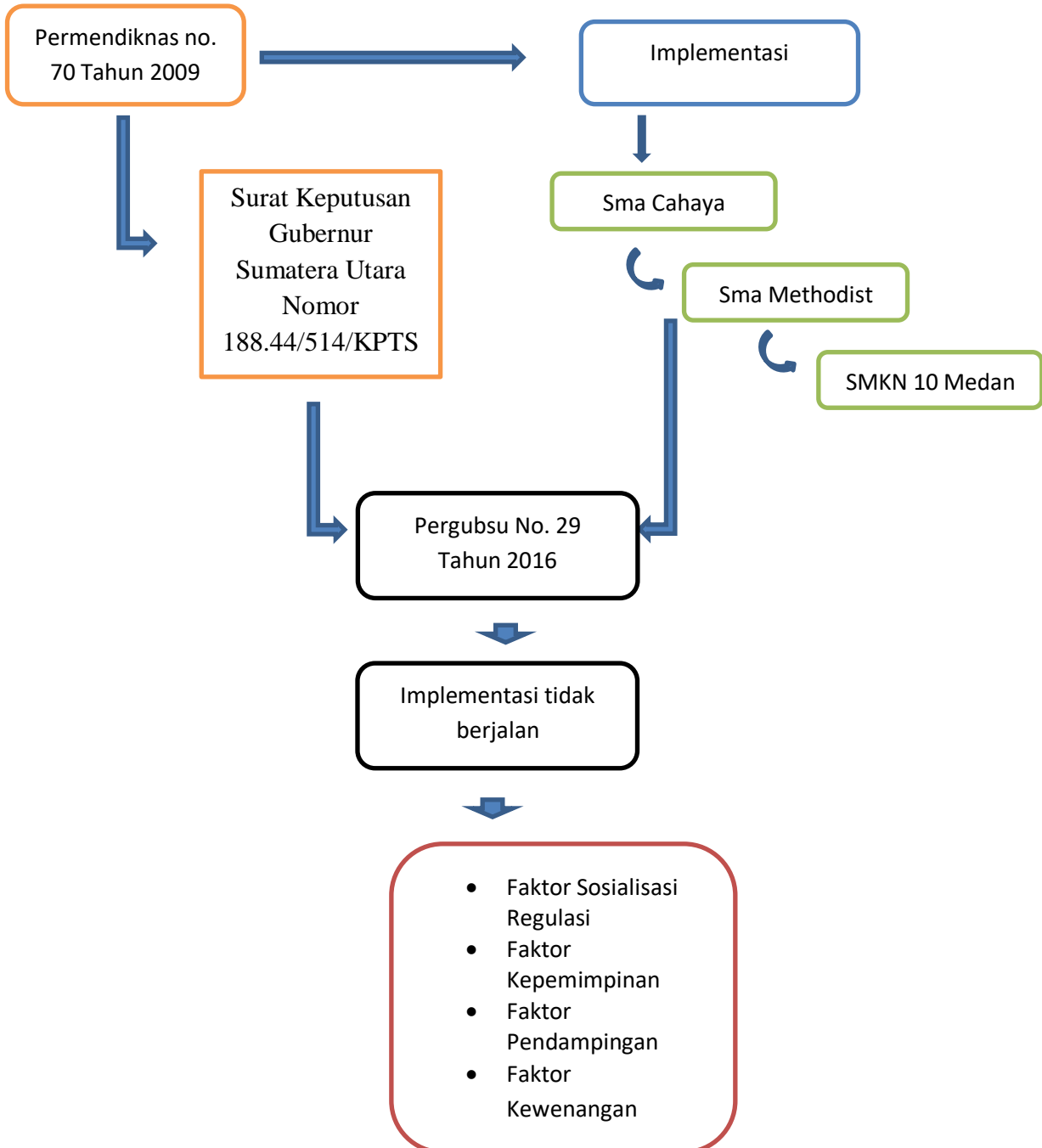
(implementasi politis). 3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik). 4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edwards III (2014) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure*. Menjelaskan empat faktor dimaksud yakni, komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Suatu lingkungan yang inklusif, dan ramah terhadap pembelajaran (LIRP) adalah lingkungan yang menerima, merawat dan mendidik semua anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau karakteristik lainnya. Mereka bisa saja anak-anak yang cacat atau berbakat, anak jalanan atau pekerja, anak-anak dari orang desa atau nomadik, anak dari minoritas budayanya atau etnisnya, linguistiknya, anak-anak yang terjangkit HIV dan AIDS, atau anak-anak dari area atau kelompok yang lemah atau termarginalisasi lainnya. Model pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pendidikan yang diindividualisasikan dapat dilakukan apabila didukung seluruh komponen internal dan eksternal persekolahan serta ada komitmen untuk mengoptimalikan potensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan karakteristiknya.

Berkaca pada mekanisme penyelenggaraan dan peran tenaga pendukung yang telah dianalisis di bab sebelumnya terlihat bahwa pendidikan inklusi khusus pada tingkat menengah atas dan kejuruan di Provinsi Sumatera Utara tidak

berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dilihat model implementasi pendidikan inklusi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut ini :

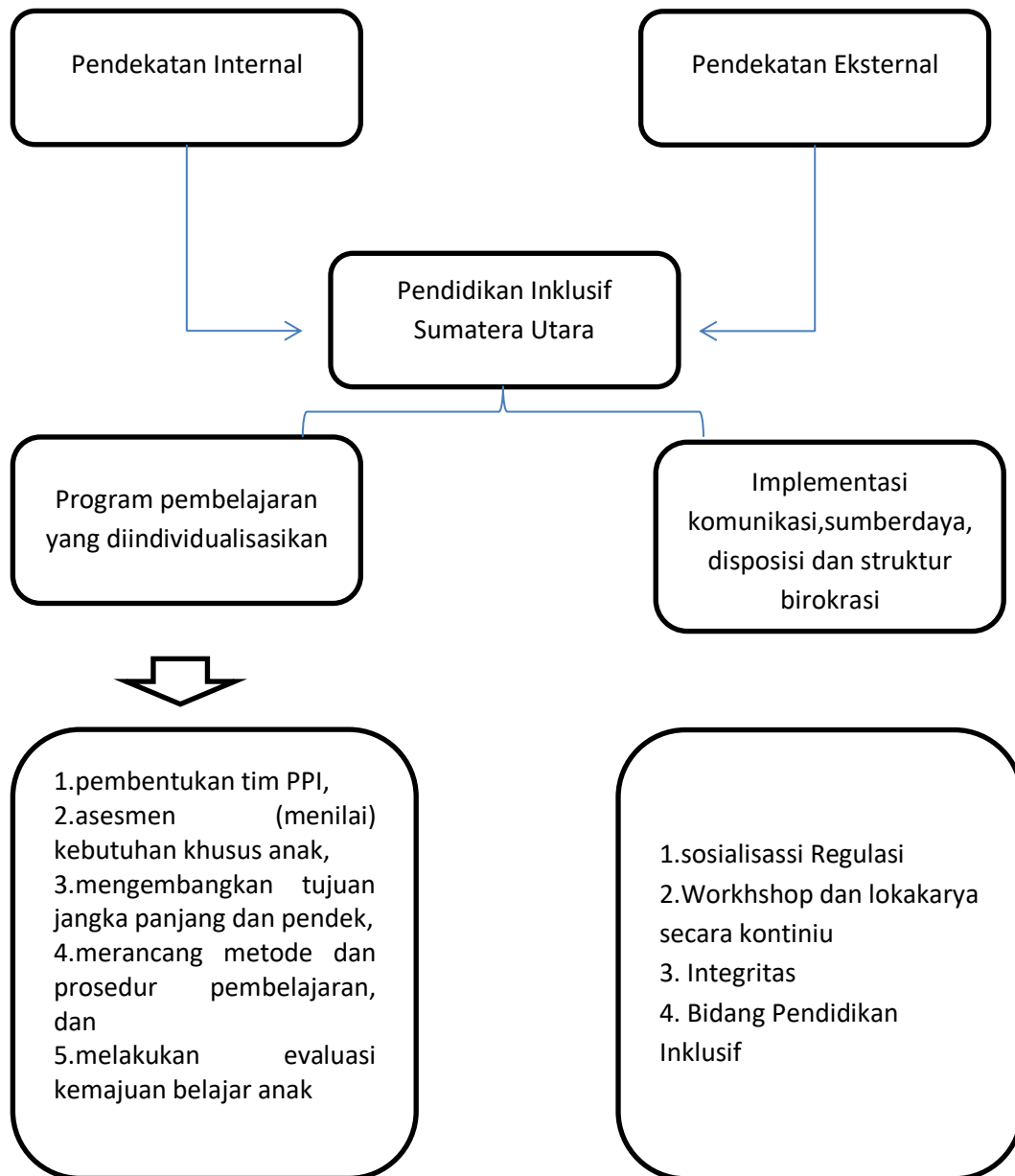


Gambar 7.1. Implementasi Pendidikan Inklusi Di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa kondisi pendidikan Inklusif di Sumatera Utara berada pada sisi yang mengkhawatirkan beberapa masalah yang menjadi sorotan antara lain :

1. tidak memiliki regulasi di tingkat daerah yang menguatkan pendidikan inklusif di Sumatera Utara.
2. Pergantian kepemimpinan secara tidak langsung mengubah rencana strategis daerah.
3. Pendampingan dan support yang tidak pernah berjalan
4. Divisi tempat pendidikan Inklusif bernaung di Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak memadai.

Empat permasalahan urgen di atas menjadi alasan kuat bagaimana pendidikan inklusif di Sumatera Utara sejak pertama kali deklarasi pada tahun 2015 tidak berjalan. Untuk menjawab hal tersebut tentu memerlukan model implementasi bagaimana pendidikan inkulsif ini dapat berjalan. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, dapat dilakukan dengan pendekatan yakni internal dan eksternal. Internal berkaitan dengan langkah apa yang dilakukan dalam mengimplementasi pendidikan inklusif dan pendekatan eksternal berkaitan dengan langkah apa yang harus dilakukan agar pendidikan inklusif itu berjalan. Untuk melihat kedua pendekatan tersebut hadir, berikut gambar yang menjelaskan kedua pendekatan tersebut :



Gambar 7.2. Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sumatera Utara

Langkah internal dilakukan dengan Program pembelajaran yang diindividualisasikan (PPI). Program ini diadopsi dari istilah Individualized

Educational Program (IEP), dalam tulisan ini IEP akan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Program Pembelajaran Individual (PPI). Digunakan istilah ini didasarkan kepada kenyataan dimana secara operasional inti persoalan dalam IEP pada dasarnya lebih menyangkut kepada kepentingan proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya dalam tulisan ini akan digunakan istilah Program Pembelajaran Individual (PPI), dan bukan program pendidikan yang diindividualisasikan (IEP) sebagai alih bahasa dari Individualized Educational Program.

PPI merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (child with special need). Mercer and Mercer (1989), mengemukakan bahwa “program individualisasi merujuk kepada suatu program pengajaran dimana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya”. Sejalan dengan pendapat tersebut dikemukakan oleh Lynch (1994) mengemukakan bahwa IEP merupakan suatu kurikulum atau suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada gaya, kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa PPI pada prinsipnya adalah suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada setiap kebutuhan individu (anak). Kedua pandangan di atas mengandung pengertian bahwa siswalah yang harus mengendalikan program, bukan program yang mengendalikan siswa.

Para ahli pendidikan sepakat bahwa salah satu pijakan dalam penyusunan program hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, karena anak yang akan

dibelajarkan. Untuk itu, masalah kebutuhan, perkembangan dan minat anak menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program.

PPI bertolak dari suatu pandangan yang mengakui manusia merupakan makhluk individu atau suatu kesatuan dari jiwa dan raga (a whole being) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dikenal sebagai organisme. Dalam organisme terdapat dorongan (drives) yang bersumber pada kebutuhan-kebutuhan dasar (basic need) dan merupakan daya penggerak (motivation) untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya (survive). Dorongan, kebutuhan dan motivasi inilah sifatnya berbedabeda, atau memiliki ciri khas tersendiri antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Pandangan pandangan tersebut intinya menghendaki agar kegiatan proses pembelajaran lebih bersifat individual.

Anak berkebutuhan khusus, permasalahan dan hambatan belajarnya sangat kompleks serta perbedaan satu sama lainnya sangat tajam, ini membawa konsekuensi kepada kompetensi guru didalam menyusun rencana pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Kegagalan-kegagalan dalam mengakomodasi kebutuhan anak dapat berakibat buruk terhadap proses pembelajaran lebih lanjut. Oleh karena itu didalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, keberadaan PPI sangat penting, karena PPI merupakan cara yang senantiasa berupaya mengakomodasi kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus.

PPI disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran setiap anak dalam upaya mengembangkan potensinya. Menurut Kitano and Kirby (1986) ada lima

langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program pembelajaran yang diindividualisasikan, yaitu:

1. pembentukan tim PPI,
2. asesmen (menilai) kebutuhan khusus anak,
3. mengembangkan tujuan jangka panjang dan pendek,
4. merancang metode dan prosedur pembelajaran, dan
5. melakukan evaluasi kemajuan belajar anak

Pendekatan kedua yakni pendekatan eksternal berusaha untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan inklusif berjalan sesuai amanat Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan turunannya pada Pergub Sumatera Utara No. 29 Tahun 2016. Berdasarkan analisis menggunakan empat item dalam teori Edwar III maka perlu koordinasi yang simultan dan berjenjang baik dari pihak sekolah, tenaga pendukung (SLB)/ praktisi anak berkebutuhan khusus dan dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Dari sisi komunikasi, tidak ada lagi miskomunikasi baik itu terkait kebijakan, langkah-langkah strategis. Untuk itu sosialisasi regulasi terkait bagaimana menjalankan pendidikan inklusif ini harus terus dijalankan.

Dari sisi sumber daya, setiap stakeholder baik itu tenaga pendukung, pihak sekolah regular dan dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara harus konsisten menjalankan pendidikan inklusif. Untuk itu workshop-workshop ataupun lokakarya terkait inklusif menjadi perlu untuk dijalankan secara kontiniu.

Dari sisi disposisi, setiap stake holder harus memiliki kesamaan sikap dalam menangani anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak yang sama

dengan anak normal lainnya dalam mendapatkan pendidikan. Untuk itu integritas menjadi penting ditegakkan.

Dari sisi struktur birokrasi, tidak adalagi tumpang tindih kepentingan atau melempar tanggung jawab pendidikan inklusif. Untuk itu bidang pendidikan inklusif menjadi urgen untuk hadir di Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar lebih konsentrasi dan fokus.